

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN	OPD
1.	Penyelenggaraan Perparkiran	Mengubah substansi materi pada Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan menggolongkan kawasan parkir dari 2 kawasan menjadi 3 kawasan dengan menambahkan kawasan wisata	Menjawab permasalahan perparkiran di Kawasan Wisata	Dinas Perhubungan
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Mengakomodir jenis-jenis retribusi dari Retribusi Pelayanan Pasar	PUPKP, BPKAD, Dinas Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup
3.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Yogyakarta	Memfasilitasi permohonan izin Konstruksi	PUPKP, Dalbang
4.	Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang	Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Menjadi dasar hukum dalam penarikan Retribusi Tera/Tera Ulang	Perindag, P3ADK
5.	Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang	Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Tera/Tera Ulang	Perindag, P3ADK
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Menambah jenis-jenis Retribusi yang baru dari penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Memberi dasar hukum penarikan Retribusi dan menambah jenis Retribusi pada kawasan Wisata	Dinas Perhubungan

8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Menyesuaikan substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas Perhubungan
9.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Tindaklanjut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Memberi dasar hukum dalam penarikan retribusi kebakaran pemeriksaan alat pemadam kebakaran Jenis Retribusi ini merupakan jenis retribusi baru yang sebelumnya belum pernah diatur	Dinas Kebakaran
10.	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2007 secara menyeluruh dan Perda Nomor 6 Tahun 2016	Menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah	BPKAD
11.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Merubah substansi materi dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Menyesuaikan hasil evaluasi pelaksanaan dengan menurunkan tarif pajak PBB., Penerapan NJOP PBB sesuai dengan harga pasar	BPKAD
12.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
13.	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Menindaklanjuti PP. Nomor 45 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif	Peraturan ini berisi mengenai kemudahan dalam mendukung iklim investasi	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, BPKAD

		dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah		
14.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	Mengubah Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	Menyesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah terpilih	BAPPEDA
15.	Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menyesuaikan substansi materi yang ada dalam UU Nomor 24 Tahun 2013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Menindaklanjuti Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Mengganti Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta	Satpol PP, Perindag,
17.	Sistem Online Pajak Daerah (e-tax)	Substansi materinya berisi mengenai kemudahan dalam pelayanan kepada wajib pajak	Substansi materi berisi mengenai pelaksanaan sistim online pajak	BPKAD
18.	Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah	Amanat Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pendapatan lain-lain PAD yang sah harus ditetapkan dengan Perda	Rekomendasi dari evaluasi Pemda DIY dan BPK	P3ADK
19.	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan	Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Perizinan bidang kesehatan	Dinkes
20.	Penataan Transportasi Lokal		Inisiatif DPRD	
21.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu		Inisiatif DPRD	
22.	Kemitraan Ekonomi Kerakyatan (UMKM dan Koperasi) berserta Pengembangannya		Inisiatif DPRD	

23.	Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum		Inisiatif DPRD	
24.	Ketahanan Keluarga		Inisiatif DPRD	
25.	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi		Inisiatif DPRD	
26.	Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Yogyakarta		Inisiatif DPRD	
27.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)		Inisiatif DPRD	
28.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016			
29.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017			
30.	APBD Tahun Anggaran 2018			